

Berita : KPK Dan BPK Didorong Turun Tangan

Entitas / Cakupan : BPK

Sumber / Hal : Galamedia / Hal.5

Edisi : Sabtu, 4 Agustus 2018

KPK dan BPK Didorong Turun Tangan

■ Dugaan Gagalnya Program RHL di Kabupaten Bandung

SOREANG, (GM).-

Center Budget Analysis (CBA) mengapresiasi sikap kritis Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Kabupaten Bandung yang mempertanyakan klaim keberhasilan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) oleh Perhutani dan BP DAS Citarum pada 2017 lalu. Kementerian Kehutanan juga didesak untuk menghentikan program RHL 2018, karena program sejenis pada tahun lalu pun berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, langkah PKSM sudah benar dan patut mendapatkan apresiasi dari semua pihak. Selain mempertanyakan hasil kerja lapangan dari program tersebut, alangkah baiknya PKSM segera membuat laporan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentunya dibarengi dengan berbagai bukti, fakta lapangan dan data yang benar.

"Langkah itu sudah benar dan wajib diapresiasi, tapi sebaiknya PKSM segera merapat ke KPK. Agar KPK turun melakukan penyelidikan, Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) juga harus segera melakukan audit mendampingi KPK. Karena ini ada potensi kerugian negara yang nilainya puluhan miliar, dan juga menyangkut upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak," ujar Uchok saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (3/8).

Untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan PKSM tersebut, kata Uchok, alangkah baiknya pemerintah sebagai pemilik anggaran segera melakukan evaluasi dengan melibatkan tim independen. Tujuannya untuk membuktikan apakah program RHL tersebut layak diteruskan atau tidak. Jangan sampai puluhan miliar uang negara menguap tanpa hasil.

"Apalagi ini program pemulihan lingkungan yang sangat penting. Jangan sampai uang negara terbuang sia-sia, tapi disisi kerusakan lingkungan tidak ada perbaikan yang signifikan. Bahkan semakin parah, karena ulah perambah hutan yang tidak bisa dihentikan oleh mereka yang diberi amanah sebagai penjaga hutan dan sungai itu," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, program RHL

yang diluncurkan pemerintah melalui Perhutani di wilayah Kabupaten Bandung pada 2017 lalu, diindikasikan gagal sejak perencanaan. Bahkan, pelaksanaannya tidak melibatkan masyarakat.

Tidak dilibatkan

Ketua PKSM Kabupaten Bandung, Ahmad Sudirman mengatakan, pihaknya sudah menduga program tersebut akan gagal. Selain tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaannya, bibit pohon yang ditanam pun kurang berkualitas.

"Dari segi pelaksanaannya pun, lembaga-lembaga masyarakat tidak dilibatkan. Perhutani lupa, itu program lingkungan atau penghijauan. Seharusnya warga sekitar dilibatkan secara langsung dan pemilihan bibit sesuai standar," ujar Ahmad.

Seperti diketahui, RHL merupakan salah satu program penunjang program pemerintah pusat dalam menghijaukan kembali hulu Sungai Citarum di Kecamatan Kertasari. Karena selama ini diindikasikan kerusakan Citarum diakibatkan kondisi hulu sungainya yang rusak. Namun, pada pelaksanaannya Per-

hutani dinilai tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat.

"Selama ini tentang kerusakan hulu sungai Citarum diindikasikan terjadi di wilayah Kertasari. Ayo kita buktikan yang rusak itu tanah milik masyarakat atau tanah milik Perhutani," katanya.

Sebagai warga asli Kertasari yang tinggal di wilayah hulu sungai Citarum, dirinya bersama perwakilan ormas dan lembaga masyarakat ikut prihatin melihat kondisi lingkungan yang rusak, terutama gagalnya program RHL.

Dalam waktu dekat, kata Ahmad, pihaknya pun akan mengadakan permasalahan tersebut kepada instansi yang bersangkutan dan Pejabat Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan, karena masyarakat merasa terdzolimi.

"Masa di tanah milik masyarakat hijau, tapi milik BUMN tidak. Kami akan sampaikan aspirasi kepada semua instansi dan akan melakukan audiensi dengan pj gubernur. Mari bersama melakukan pengecekan langsung ke lokasi, jangan sampai dilihat dari satu sisi saja," tukasnya. (B.122)**